

Pemprov Sumut Puji Kinerja Ombudsman



Pertemuan Ombudsman RI dengan Pemprov Sumut, Rabu (29/8) di Medan. (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 29/8 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memuji kinerja Ombudsman wilayah ini di bawah pimpinan Abyadi Siregar dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Hubungan Pemprov Sumut dengan Ombudsman terjalin baik dan kinerja kepala perwakilan ombudsman RI provinsi Sumut Abyadi Siregar juga sangat bagus,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Sumut Muhammad Fitriyus mewakili Penjabat Gubernur Sumut Eko Subowo saat menerima kunjungan Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu.

Seperti diketahui Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan.

Pemprov kata Fitriyus sangat mengapresiasi kinerja ombudsman Sumut yang dinilai banyak mengungkap sejumlah persoalan yang bertentangan dengan sistem pelayanan publik.

Selain itu dia juga menyambut baik kedatangan Ombudsman RI beserta rombongan.

Pertemuan seperti ini, kata dia merupakan salah satu bentuk kerja sama dan komunikasi antara pusat dan daerah yang harus selalu dijaga.

“Kordinasi seperti ini sangat penting. Karena sebenarnya pemerintah dan Ombudsman memiliki tujuan yang sama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami, pemerintah, pelaksana pelayanan tersebut dan Ombudsman mengawasi jalannya pelayanan,” katanya.

Dia berharap agar kedepannya pemerintah dan Ombudsman melakukan lebih banyak sinergi. Tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga pengembangan kapasitas penyelenggara pelayanan publik. “Mungkin bagus sekali kalau Ombudsman bisa membuat workshop atau pembekalan-pembekalan tentang pelayanan publik. Karena kami merasa bahwa kami juga perlu dibina, khususnya tentang standar-standar pelayanan publik yang baik,” ucapnya.

Sementara Dadan S Suharmawijaya mengharapkan agar penyelenggaraan pelayanan publik di Sumut jauh dari sejumlah penyimpangan proses administrasi atau yang juga dikenal dengan istilah “zero maladministrasi”.

“Kualitas pelayanan harus lancar dan masyarakat terpuaskan,” ujarnya. (LMC-02)